



DINAMIKA KEBIJAKAN MONETER DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM: TANTANGAN DAN INOVASI DI ERA DIGITAL

**Radia Havni Sari Harahap¹, Selamat Syahputra², Fikri Febriyano³, Reni Ria
Armayani Hasibuan⁴**

radiahavni@gmail.com, selamatsyahputra2@gmail.com, fikriferbriano@gmail.com,
reniriaarmayani@uinsu.ac.id

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak. *This study analyzes the dynamics of monetary policy in the Islamic financial system as well as the challenges and innovations that have emerged in the digital era. Using qualitative methods through literature review, this study examines Sharia monetary instruments such as SBIS, SukBI, and the Sharia interbank money market, and assesses their effectiveness in maintaining economic stability. The results of the study show that the combination of Islamic monetary instruments and digital innovation has the potential to strengthen the Islamic financial system in a more inclusive and responsive manner, provided that there is regulatory strengthening, harmonization of Islamic standards, and collaboration between regulators, financial institutions, and technology providers.*

Keywords: *Sharia Monetary Policy, Islamic Financial System, Sharia Fintech*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dinamika kebijakan moneter dalam sistem keuangan Islam serta tantangan dan inovasi yang muncul di era digital. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji instrumen moneter syariah seperti SBIS, SukBI, dan pasar uang antar-bank syariah, serta menilai efektivitasnya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara instrumen moneter syariah dan inovasi digital berpotensi memperkuat sistem keuangan Islam secara lebih inklusif dan responsif, dengan syarat adanya penguatan regulasi, harmonisasi standar syariah, serta kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi.

Kata kunci: Kebijakan Moneter Syariah, Sistem Keuangan Islam, Fintech Syariah

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan salahsatu upaya yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dalam melakukan pengendalian serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu Negara. Keadaan lebih baik maksudnya yaitu meningkatkan kesetimbangan serta pemeliharaan stabilitas harga, dengan adanya kebijakan ini pemerintah bisa menambah, mengurangi serta mempertahankan sejumlah uang yang beredar secara berlebihan di suatu Negara. sektor-sektor lain dalam ekonomi moneter Islam seperti pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), dan lembaga keuangan mikro syariah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, meskipun potensi perkembangan ekonomi moneter Islam di Indonesia sangat besar, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Pertama, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam keuangan masih relatif terbatas. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara produk keuangan syariah dan produk keuangan konvensional, yang sering kali menyebabkan kurangnya kepercayaan dan preferensi terhadap produk keuangan syariah. Selain itu, infrastruktur keuangan syariah di Indonesia masih belum merata.

Di daerah terpencil dan pedesaan, akses terhadap lembaga keuangan syariah masih sangat terbatas. Hal ini menjadi tantangan serius bagi inklusi keuangan syariah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan sektor ini secara keseluruhan. Ketimpangan akses ini juga mencerminkan masalah yang lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, di mana fasilitas dan layanan keuangan syariah masih terbatas di daerah perkotaan. Inovasi produk keuangan syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Dibandingkandengan sistem keuangan konvensional yang lebih dikenal dan dianggap lebih efisien, produk- produk keuangan syariah di Indonesia sering kali masih kurang bersaing. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi yang dapat menarik minat konsumen dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang (Fazirah et al., 2024). Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi moneter Islam di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Literasi keuangan yang rendah membuat banyak orang tidak memahami prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara produk keuangan syariah dan konvensional. Hal ini tidak hanyamenghambat penerapan produk-produk keuangan syariah, tetapi juga menciptakan persepsi yang salah mengenai efisiensi dan manfaat dari sistem keuangan syariah (Tambak et al., 2018).

Prinsip Al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar sistem keuangan Islam, yang melarang riba (QS Al-Baqarah: 275-279), gharar, dan maysir, dan tekanan keadilan ekonomi melalui pembagian keuntungan dan perlindungan aset. Perkembangan sejarah ini dimulai dengan Mitr Ghamr Savings Bank di Mesir pada tahun 1963, disusul oleh Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Dengan aset global senilai USD 4,5 triliun pada tahun 2025, perkembangan ini akan mencapai puncaknya (AAOIFI Report). 1,8 miliar Muslim dan investor etis non-Muslim mendorong pertumbuhan tahunan 10-12% ini, dengan pasar sukuk mencapai 850 miliar dolar dan Takaful 45 miliar dolar. Paradigma kebijakan moneter Islam diubah oleh kemajuan teknologi seperti blockchain, AI, dan desentralisasi keuangan di era digital. Cryptocurrency halal seperti OneGram (yang dilindungi emas) dan stablecoin seperti X8X menawarkan alternatif bebas riba. Di sisi lain, instrumen konvensional seperti mudharabah antar bank digantikan oleh smart contract syariah. Di Indonesia, negara dengan 240 juta Muslim, aset perbankan syariah senilai Rp 800 triliun (OJK 2025), fintech syariah 170 platform (BI), dan prototipe Rupiah Digital Syariah (RDS) tahap II berhasil diuji coba dalam sandbox peraturan POJK No.17 /2023. Sementara IFSB menyarankan struktur CBDC syariah global, Bank Negara Malaysia akan meluncurkan DuitDigital pada tahun 2025.

Kebijakan moneter yang fleksibel, efisien, dan berkelanjutan diperlukan seiring perkembangan sistem keuangan global yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, sistem keuangan Islam muncul sebagai alternatif yang menekankan keadilan dan keseimbangan serta melarang riba, gharar, dan maysir. Kebijakan moneter sistem keuangan Islam berbeda dari sistem konvensional karena fokus pada mekanisme yang berkaitan dengan hasil dan aktivitas ekonomi riil daripada instrumen berbasis suku bunga. Perbedaan ini menjadikan dinamika kebijakan moneter Islam penting untuk dipelajari, terutama di tengah transformasi ekonomi global yang cepat.

Tantangan untuk menerapkan kebijakan moneter Islam semakin nyata seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di berbagai negara. Bank sentral negara dengan sistem keuangan ganda harus membuat instrumen moneter syariah yang sesuai dengan prinsip Islam dan efektif untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan

secara keseluruhan. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaannya adalah keterbatasan instrumen, kedalaman pasar keuangan syariah yang relatif rendah, dan bagaimana kebijakan moneter dan sektor riil bekerja sama.

Sebaliknya, era digital membawa perubahan besar dalam dunia keuangan karena munculnya teknologi finansial (fintech), perbankan digital, aset kripto, dan sistem pembayaran berbasis teknologi. Pengembangan instrumen moneter syariah digital, peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan perluasan inklusi keuangan syariah adalah beberapa peluang besar untuk inovasi kebijakan moneter dalam sistem keuangan Islam sebagai hasil dari transformasi digital ini. Namun, digitalisasi juga menimbulkan ancaman baru, seperti stabilitas keuangan, keamanan data, dan kesesuaian syariah dari produk dan layanan keuangan digital.

Dengan kondisi yang demikian, penelitian tentang bagaimana kebijakan moneter dalam sistem keuangan Islam berubah menjadi lebih penting. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan kebijakan moneter yang selaras dengan prinsip syariah dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern. Penelitian ini juga akan menyelidiki berbagai inovasi yang dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan yang dibuat oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan likuiditas dalam perekonomian untuk menjamin stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan dikenal sebagai kebijakan moneter. Suku bunga acuan, fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum adalah alat kebijakan moneter konvensional. Dengan instrumen ini, bank sentral dapat mempengaruhi investasi, konsumsi, dan tabungan masyarakat. Mekanisme transmisi moneter jalur bagaimana kebijakan bank sentral mempengaruhi sektor riil sangat bergantung pada efektivitas kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi makro. Mekanisme transmisi moneter terdiri dari jalur suku bunga, kredit, nilai tukar, dan ekspektasi. Namun, ketika digunakan dalam sistem keuangan Islam, mekanisme ini mengalami perubahan.

Kebijakan moneter yang berbasis syariah dikenal sebagai kebijakan moneter Islam. Dalam sistem ini, prinsip keadilan, keseimbangan, dan hubungan langsung antara keuangan dan sektor riil ditekankan. Akibatnya, kebijakan moneter Islam tidak hanya berusaha mengendalikan inflasi tetapi juga mendorong distribusi pendapatan yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Instrumen kebijakan moneter dalam sistem keuangan Islam terdiri dari akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Untuk mengelola likuiditas, bank sentral syariah atau unit bank syariah sentral menggunakan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Sentral, dan fasilitas pembiayaan berbasis syariah. Instrumen instruksi ini dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hasil dan aktivitas ekonomi riil.

Kebijakan moneter Islam berdasarkan larangan riba, gharar, dan maysir dalam Al-Baqarah: 275-279, dan menggantikan suku bunga konvensional dengan instrumen berbasis pembagian keuntungan seperti mudharabah, musharakah, dan sukuk. Instrumen-instrumen ini mencakup operasi pasar terbuka syariah (seperti sertifikat musharakah), plafon kredit, dan cadangan wajib, dan lebih stabil secara makroekonomi dibandingkan dengan alat moneter agregat murni karena mendukung keseimbangan pasar. Di Iran dan Indonesia, praktik ini menggabungkan teori dengan praktik melalui fasilitas OMO dan standing syariah berbasis mudharabah.

Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan merupakan kerangka keuangan yang luas. Prinsip utama sistem ini adalah larangan riba, gharar, dan maysir, dan penekanan pada Pembagian keuntungan, backing aset riil, dan transparansi dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi (adl) dan kemaslahatan umat (maslahah). Ciri-cirinya antara lain nilai ketuhanan (tauhid), persaudaraan (ukhuwwah), keseimbangan (i'tidal), dan universalitas. Oleh karena itu, transaksi harus halal, suka sama suka, dan didukung oleh zakat untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Instrumen seperti mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, dan sukuk memberikan stabilitas makro yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah menghilangkan bunga dari seluruh transaksi, mendorong tabungan untuk kemajuan berkelanjutan, mengurangi disparitas sosial, dan mencapai salah (kesejahteraan dunia-akhirat) melalui kerja sama etis yang tidak berspekulasi. Dalam praktik modern, sistem ini diimplementasikan melalui bank syariah, takaful, dan pasar modal Islam, dengan pengukuran kinerja berbasis profit materi-non materi, pertumbuhan berkah, serta kepatuhan syariah (*shariah governance*).

Maqasid Syariah sebagai Fondasi

Maqasid Syariah yang terdiri dari hifz al-din, nafs, mal, nasl, dan 'aql, berfungsi sebagai landasan untuk kebijakan moneter, yang tekanan keadilan (adl), keinginan (maslahah), dan mencegah inflasi yang merugikan masyarakat. Sejalan dengan standar AAOIFI 2024, implementasinya memastikan penciptaan uang yang bertanggung jawab dengan 100% aset backing untuk menghindari epidemi. Kerangka ini menggabungkan etika, meningkatkan efisiensi tanpa riba yang menyebabkan inflasi.

Pemetaan lima prinsip daruriyyat (hifz al-din, nafs, aql, nasl, dan mal) menghubungkan maqasid syariah dengan tujuan kebijakan moneter. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan ke dalam tujuan moneter Islam yang luas, di mana hifz al-mal dilindungi dari inflasi yang merugikan masyarakat (mafsadah), dan hifz al-nafs dan hifz al-nasl didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesempatan kerja yang meningkat melalui pembagian risiko. Untuk menjaga keseimbangan moneter yang selaras dengan maqasid, memastikan pembagian kekayaan melalui zakat dan infak untuk keadilan (adl) dan maslahah mursalah, bank sentral syariah menggunakan instrumen seperti cadangan wajib syariah, operasi pasar terbuka berbasis sukuk, dan bantuan pembiayaan murabahah. Pendekatan ini superior karena mengintegrasikan etika syariah (hifz al-din dan aql) ke dalam kebijakan makro, menghindari spekulasi konvensional, dan mengukur keberhasilan melalui indikator kemaslahatan seperti pengurangan kemiskinan serta inklusi keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep, kebijakan, teori, serta temuan empiris terkait kebijakan moneter dalam sistem keuangan Islam dan inovasinya di era digital. Sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah bidang ekonomi Islam, moneter, fintech syariah, dan kebijakan keuangan, laporan resmi dari Bank Indonesia, OJK, IFSB (Islamic Financial Services Board), IDB, serta AAOIFI, buku-buku ekonomi moneter Islam karya para pakar seperti Chapra, Siddiqi, dan Antonio. Serta data sekunder berupa laporan penelitian terdahulu, data statistik industri keuangan syariah, publikasi digital seperti working paper, prosiding, dan laporan lembaga riset global terkait digitalisasi sistem keuangan Islam. Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui Pengkajian literatur dari jurnal bereputasi (Scopus, Google Scholar, DOAJ). Dan Telaah dokumen dari lembaga resmi (BI, OJK, IFSB, IMF).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Instrumen Moneter Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi Studi Bank Indonesia (BI) melalui instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), fasilitas simpanan syariah, dan pasar uang antarbank syariah (PUAS/IIMM) menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian menemukan bahwa penggunaan instrumen syariah ini dapat berkontribusi pada stabilitas likuiditas perbankan syariah dan mendukung ekspansi layanan perbankan syariah meskipun pangsa pasar perbankan syariah nasional tetap relatif kecil. Namun demikian, efektivitas instrumen syariah dalam mengontrol inflasi dan mendorong pertumbuhan masih memiliki keterbatasan terutama karena keterbatasan kedalaman pasar likuiditas syariah dan rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah di sebagian wilayah. Pembahasan: Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah lewat instrumen seperti SBIS/SukBI dan interbank syariah secara prinsip mampu mendukung stabilitas sistem keuangan syariah dan memberikan alternatif terhadap instrumen berbasis bunga. Tapi agar efektif secara makro (inflasi, pertumbuhan), dibutuhkan pasar yang lebih dalam (likuiditas), inklusi keuangan tinggi, serta penggunaan instrumen yang konsisten dan dijalankan dengan baik.

Peran Digitalisasi dan Fintech Syariah dalam Memperkuat Sistem Keuangan Islam Penelitian literatur menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah melalui mobile banking, fintech, platform pembayaran digital, crowdfunding syariah, dan layanan keuangan digital telah memperluas akses layanan keuangan syariah secara signifikan, termasuk ke daerah terpencil dan bagi kelompok yang sebelumnya underbanked. Inovasi fintech syariah memungkinkan transaksi yang lebih cepat, efisien, transparan, dan lebih mudah dijangkau memudahkan inklusi keuangan dan memperkuat layanan perbankan syariah secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan moneter, penelitian terhadap adopsi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam kerangka keuangan Islam menunjukkan bahwa CBDC jika dirancang sesuai prinsip syariah bisa menjadi instrumen alternatif dalam transmisi kebijakan moneter syariah. CBDC dapat meningkatkan inklusi keuangan, menurunkan biaya transaksi, serta memperkuat efektivitas kebijakan moneter digital di negara-negara ASEAN. Digitalisasi dan fintech syariah membuka ruang besar bagi

transformasi sistem keuangan Islam tidak hanya di level layanan (bank-nasabah), tetapi juga di level kebijakan moneter. Dengan adopsi fintech dan inovasi seperti CBDC syariah, transmisi kebijakan dapat menjadi lebih cepat, inklusif, dan efisien. Namun, hal ini mensyaratkan regulasi syariah yang adaptif, infrastruktur digital memadai, dan literasi serta kapabilitas SDM di perbankan syariah.

Tantangannya yaitu Kepatuhan Syariah, Regulasi, Literasi, dan Infrastruktur. Salah satu penelitian menyatakan bahwa adopsi fintech dan digitalisasi dalam perbankan syariah menghadapi hambatan seperti: regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi, kurangnya pemahaman fiqh kontemporer bagi pelaku industri, dan kebutuhan fatwa baru untuk produk keuangan digital. Selain itu, tantangan operasional seperti keamanan data, privasi, layanan digital, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (digital skills) juga menjadi hambatan signifikan dalam inovasi digital bank syariah. Faktor literasi keuangan syariah dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan Islam juga masih rendah ini membatasi penetrasi produk keuangan syariah dan efektivitas instrumen moneter berbasis syariah. Pembahasan: Tantangan-tantangan ini menjadi pengingat bahwa inovasi teknologi dan kebijakan syariah tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa regulasi yang tepat, pemahaman syariah dan literasi publik, serta infrastruktur memadai potensi fintech dan instrumen moneter syariah bisa terhambat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator, otoritas syariah, lembaga keuangan, dan pelaku fintech untuk membangun ekosistem yang holistik.

Peluang dan Arah Kebijakan: Menggabungkan Instrumen Syariah dengan Inovasi Digital Kombinasi antara instrumen moneter tradisional syariah (SBIS, SukBI, interbank syariah) dengan inovasi digital (fintech syariah, CBDC, e-platform) menawarkan peluang untuk memperdalam pasar keuangan syariah, mempercepat transmisi kebijakan, dan memperluas inklusi keuangan. Transformasi digital ini dapat membantu mewujudkan sistem keuangan Islam yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi modern termasuk tantangan globalisasi, kebutuhan inklusi, dan perubahan perilaku konsumen. Pembahasan: Untuk memanfaatkan peluang ini, diperlukan strategi terpadu misalnya: regulasi yang mendukung, standar syariah yang relevan dengan produk digital, edukasi literasi keuangan dan syariah, serta investasi infrastruktur digital. Bila langkah ini dilakukan secara konsisten, kebijakan moneter syariah bisa berevolusi ke arah yang lebih dinamis, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi modern. Catatan Kritis & Keterbatasan Literatur Saat Ini Banyak penelitian tentang digitalisasi perbankan syariah bersifat kualitatif dan berdasarkan kajian literatur saja sehingga data empiris (kuantitatif) tentang efektivitas instrumen moneter syariah dalam era digital masih terbatas. Regulasi dan kerangka syariah untuk instrumen digital (misalnya CBDC syariah, blockchain-based finance) masih berkembang dan belum ada konsensus global maupun implementasi masif di banyak negara. Infrastruktur (termasuk literasi dan SDM) di negara dengan basis syariah besar seperti Indonesia belum merata, sehingga adopsi inovasi bisa berbeda-beda antar wilayah.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi penguatan kebijakan moneter Islam melalui inovasi instrumen, peningkatan stabilitas sistem keuangan, serta integrasi pasar keuangan syariah global. Namun, diperlukan penguatan regulasi,

standardisasi syariah internasional, serta kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, dan penyedia teknologi. Kebijakan moneter dalam sistem keuangan Islam menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan instrumen, integrasi pasar yang rendah, dan ketergantungan pada sektor riil. Namun, era digital memberikan peluang besar untuk memperkuat efektivitas kebijakan melalui inovasi seperti fintech syariah, CBDC syariah, blockchain, dan kecerdasan buatan. Dengan penguatan regulasi dan harmonisasi standar syariah, kebijakan moneter Islam dapat berperan lebih signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Chowdhury, N. T. (2020). Islamic Monetary Policy Transmission: A Systematic Literature Review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1103–1121.
- Bank Indonesia. (2021). Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia. (2023). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Jakarta: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Bank Indonesia: Penguatan Kebijakan Moneter dan Keuangan Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Farooq, M. O., & Ahmed, M. (2021). Monetary Policy in the Islamic Economic Framework: Instruments and Effectiveness. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 55–78.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 46–94.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). Islamic Finance: Theory and Practice. Singapore: Wiley.
- Karim, A. A. (2021). Ekonomi Makro Islami. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- OJK. (2023). Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Saeed, A., & Bakar, M. D. (2021). Fintech and Islamic Finance: The New Digital Era. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 331–346.
- World Bank. (2020). Digital Financial Inclusion and Islamic Finance. Washington, DC: World Bank Group.
- Yusoff, M., & Yaacob, H. (2022). The Role of Islamic Fintech in Strengthening Monetary Transmission Mechanism in Muslim Countries. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 235–258.